

BAB IV

ALASAN IKHWANUL MUSLIMIN MENJALIN KERJASAMA DENGAN SALAFI PASKA REVOLUSI

Setelah menjelaskan beberapa karakteristik dakwah kelompok Ikhwanul Muslimin dan Salafi serta proses yang telah dijalankan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin dalam membentuk sebuah negara Islam melalui tahapan keempat atau dalam bidang pemerintahan (politik). Kali ini penulis ingin menjelaskan 2 alasan yang menyebabkan kelompok Ikhwanul Muslimin bersedia menjalin kerjasama dengan kelompok Salafi dalam membentuk negara Islam di Mesir. Yang pertama adalah karena terjadi perubahan orientasi yang cukup signifikan pada pihak Salafi mengenai politik paska terjadinya revolusi di Mesir dan yang kedua adalah persamaan beberapa sasaran dan metode Salafi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin dalam pembentukan negara Islam.

A. Perubahan Orientasi Salafi Tentang Politik Paska Revolusi.

Perubahan pemikiran yang dianut komunitas Muslim yang menyatakan diri mereka sebagai pengikut salaf atau Salafi, semakin mencolok paska terjadi revolusi di Mesir. Bukan hanya mengoreksi ulang pendapat mereka mengenai demonstrasi dan penyampaian kritik secara terang-terangan kepada penguasa, namun pendapat fikih yang berkenaan dengan masalah pemilu juga tidak luput dari koreksi.

Perubahan tersebut menjadi suatu yang sangat penting mengingat bahwa perubahan yang terjadi pada kelompok Salafi adalah pada sisi politik yang selama ini sangat sulit untuk dirubah. Selain itu, sisi politik ini telah menjadi fokus tahapan tujuan gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin sebagai batu loncatan menuju dunia Islam yang lebih universal terutama setelah bergulirnya revolusi di Mesir.

Pada hari jum'at tanggal 18 februari 2011, kelompok Salafi melaksanakan muktamar di Manshurah, Mesir. Awalnya muktamar ini merupakan bentuk dukungan agar UU pasal 2, yang menyatakan bahwa syariat adalah sumber hukum Mesir, agar tidak diutak-atik. Namun pembicaraan juga berisi seruan untuk meninjau ulang pandangan mengenai pemilu.⁸²

Syeikh Muhammad Hasan selaku salah satu pembicara menyatakan,

"Saya meminta kepada para Syeikh kita untuk meninjau kembali, terhadap hal-hal yang telah diterima pada tahun-tahun sebelumnya, seperti masalah pencalonan dalam parlemen dan syura, serta (pencalonan) presiden dan pemerintahan. Saya meminta kepada para Syeikh kita untuk berkumpul untuk mengurai masalah ini, agar para pemuda kita terhindar dari fitnah dan bercerai-berai."

Sepertinya, usulan Syeikh Muhammad Hasan kepada para tokoh Salafi untuk mengoreksi ulang pendapat mengenai hukum mengikuti pemilu, mendapatkan sambutan. Syeikh Ahmad Farid, yang juga salah satu tokoh komunitas Salafi Iskandariyah juga menyatakan bahwa pembentukan partai politik masih merupakan

⁸² Abu Gozzah, Musim Semi Revolusi Dunia Arab. Maktaba Gaza, Jakarta. Hal 59 di ambil dari situs berita lokal Mesir, *Al Yaum As Sabi'* (19/2)

kemungkinan-kemungkinan. Hal ini menunjukkan tekad komunitas ini berpartisipasi dalam pemilu.⁸³

Respon terhadap usulan itu semakin besar dengan berkumpulnya para tokoh Salafi yang tergabung dalam Jama'ah Anshar As Sunnah Al Muhammadiyah untuk membahas hukum berpartisipasi dalam pemilu. Akhirnya, pada tanggal 12 maret 2011 Anshar As Sunnah Al Muhammadiyah pusat secara resmi mengumumkan pandangan mereka dalam situs resminya, Elsna.Com. Salah satu poin dari keputusan menyebutkan, "Kami tidak melihat adanya larangan Syar'i untuk berpartisipasi dalam perpolitikan, baik di parlemen, syura, serta parlemen lokal, karena hal itu merupakan wasilah dakwah kepada masyarakat umum."

Perubahan kondisi politik di Mesir yang terbilang singkat ini telah mendorong para tokoh Salafi untuk terjun ke ranah politik yaitu sesuatu yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan. Karena peristiwa revolusi tersebut telah memberikan celah dan kesempatan kepada mereka untuk melakukannya. Terjunnya para Salafiyin ini di tunjukkan tidak hanya dengan mendirikan partai politik dan mengutus para tokoh mereka dalam pencalonan legislative dan juga presiden, tetapi juga sampai pada usaha mereka untuk mendukung para calon Muslim serta berusaha memblokir suara kepada para tokoh sekuler yang didominasi oleh orang-orang pemerintahan pada masa Mubarak. Meskipun sebelum revolusi Salafi terbilang lebih lunak dan jarang

⁸³ Abu Gozzah, Musim Semi Revolusi Dunia Arab. Maktaba Gaza, Jakarta. dikutip oleh *Al Mafkarah* (6/3), dari koran *As Syuruq*

menentang pemerintahan. Hal itu membuktikan bahwa revolusi telah berhasil merubah sikap mereka kepada rezim Mubarak.

Berapa bukti dari dukungan tersebut adalah adanya dukungan yang berupa Himbauan ditujukan kepada umat Islam agar dalam pemilu penentuan presiden, mereka memilih calon yang paling memiliki perhatian kepada urusan umat Islam. Keputusan ini adalah hasil dari musyawarah ahli syura' jama'ah ini, diantaranya adalah Dr. Abdullah Syakir, Syeikh Muhammad Husein Ya'kub, Syeikh Muhammad Hasan, Dr. Jamal Al Murakibi, Syeikh Mustafa Al Adawi, Syeikh Abu Bakar A Hanbali, Syeikh Wahid Abdussalam Bali, Serta Syeikh Jamal Abdurrahman.⁸⁴

Sebenarnya, pendapat bolehnya mengikuti pemilu bukan hanya pandangan sejumlah tokoh Salafi Mesir paska revolusi saja. Sebelumnya beberapa tokoh Salafi di luar Mesir juga telah meninjau ulang pendapat yang mereka anut mengenai pemilu. Dua tokoh Salafi Yordan yang saat ini masih dijadikan rujukan sebagian komunitas Salafi Indonesia. Yakni syeikh Ali Al Halabi dan Syeikh Masyhur Hasan Ali Salman telah menyatakan bahwa berpartisipasi dalam pemilu merupakan hal yang dibolehkan, salah satu tokoh mereka berkata,⁸⁵

“Sesungguhnya Salafiyin tidak mendukung pencalonan untuk pemilu. Namun mereka memandang bahwa memilih siapa yang lebih utama dan lebih baik serta paling banyak positifnya dan paling minim negatifnya untuk masalah umum adalah hal yang diperbolehkan.” Kata Syeikh Ali Hasan kepada *Al Jazeera*.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid., dikutip dari *Al Jazeera* (26/10).

Masih menurut syeikh Al Halabi,

“Syeikh Al Albani juga memiliki pendapat membolehkan berpartisipasi dalam pemilu, di saat itu beberapa muridnya menyesali dengan menggunakan adab. Hari ini, sebagai dampak dari perkembangan pemikiran dan memandang sebagai masalah umum, kami kembali kepada pendapat Syeikh Al Albani, tentang bolehnya mengikuti pemilu parlemen. “Ungkap Al Halabi.”

Demikian pula Syeikh Masyhur Hasan Ali Salman menyatakan,

“Pemerintah telah meminta kepada kalian untuk mengikuti pemilu, dan hal itu bukanlah keharaman. Janganlah kalian melakukan pemboikotan. Pemboikotan bukanlah ibadah. Adalah orang yang salah jika ia berfikir melakukan ibadah kepada Allah dengan melakukan pemboikotan.”

Namun, perubahan pendapat beberapa tokoh Salafi Mesir dan Yordan masih terhitung “lambat” dibanding saudara-saudara mereka di Kuwait dan Bahrain. Di Kuwait *At Tajammu' Al Islami As Salafi* telah bergabung dalam parlemen. Sebelumnya tahun 1981 komunitas Salafi yang pada saat itu diwakili *Ihya' At Turats* memboikot pemilu, namun setelah itu mereka bergabung dengan parlemen.

Khalid Sulthan, salah satu anggota parlemen dari *At Tajammu'* menyatakan bahwa organisasi itu bukan sayap politik *Ihya At Turats*. Namun menurutnya, keduanya adalah Salafi yang tidak bertentangan satu sama lain. Organisasi ini juga bercita-cita mewujudkan perbaikan dalam masyarakat Kuwait dengan Al Qur'an dan As Sunnah sesuai dengan *Manhaj Salaf As Shalih*. Dalam pemilu tahun 2008 *Tajammu Al Islami As Salafi* tercatat memperoleh 4 kursi di parlemen kuwait.⁸⁶

Sedangkan di Bahrain, komunitas Salafi juga sudah bergabung dengan parlemen. Di bawah komando Syeikh Adil Al Mu'awwidah, pada 6 mei 2002

⁸⁶ *ibid.*, hal 60 dikutip dari situs resminya, AlIslami.org,

didirikanlah *Al Ashalah Al Islamiyah*, organisasi politik yang pada pemilu tahun 2010 lalu memperoleh 4 kursi.⁸⁷

Menurut sebagian komunitas Salafi, mereka ikut pemilu agar jangan sampai posisi penting diduduki *Ahlul Bid'ah* yang bisa mengancam *Ahlus Sunnah*. Salafi bukanlah sebuah gerakan yang berbentuk organisasi rapi, tetapi Salafi merupakan sebuah corak dan metode berfikir, baik itu dalam masalah aqidah, maupun dalam permasalahan fikih. Dalam permasalahan aqidah mereka mengikuti Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab, sedangkan dalam permasalahan fikih mereka lebih banyak merujuk kepada Mazhab Hambaly, walaupun mereka mengatakan bahwa Salafiyah tidak mengenal taklid terhadap mazhab tertentu.

Satu hal lagi yang menunjukkan perubahan dalam kubu Salafi paska pemilu yaitu munculnya beberapa gerakan dan organisasi yang di dalamnya banyak berkumpul masa pengikut dari Salafi. Gerakan-gerakan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya beberapa partai politik yang berafiliasi pada Salafi pada pemilu di Mesir paska revolusi. Adapaun gerakan-gerakan tersebut antara lain adalah:

1. Dakwah as-Salafiyah

Gerakan ini muncul pada era 70-an, dipelopori oleh para mahasiswa dan pelajar di Universitas Alexandria, diantaranya adalah: Syaikh Muhammad

⁸⁷ *Ibid.*, hal 61

Ismail Muqaddam, Sa'id Abdul `Adhzim, dan Ahmad Farid. Kemudian gerakan ini muncul di Kairo, yang dipelopori oleh Syaikh Abdul Fatah Zainy. Pada tahun 1978 Mereka menolak untuk bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, kemudian mereka memproklamkan berdirinya "Madrasah Salafiyah", setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya mereka mengganti nama organisasi ini dengan "Dakwah Salafiyah".

Sebelum terjadinya revolusi 25 Januari, organisasi ini masih belum terstruktur dengan rapi, namun setelah revolusi berhasil, mereka menata Dakwah Salafiyah dengan baik, dan muncullah suara-suara yang mendukung untuk terjun kedalam politik praktis, sehingga tercapailah sebuah kesepakatan untuk mendirikan sebuah partai dengan nama "Hizbun Nūr". Dalam pemilu parlemen dan majlis syuro kemaren, mereka cukup mendapat dukungan dari rakyat Mesir, sehingga mereka berhasil meraih posisi kedua setelah FJP.

2. Salafiyah `Ilmiyah

Gerakan Salafi ini lebih fokus terhadap kegiatan-kegiatan ilmiah, tanpa ada kecenderungan terhadap dunia politik. Diantara tokoh Salafi yang tergabung dalam gerakan ini adalah: Syaikh Muhammad Hassan, Abu Ishak al-Huwainy, dan Musthafa al-Adawy.

3. Salafiyah Harakiyah

Seiring dengan munculnya Salafiyah 'Ilmiah dan Dakwah Salafiyah, muncul juga sebuah gerakan Salafi yang lain, yaitu "Salafiyah Harakiyah". Gerakan ini hampir sama dengan gerakan Salafi yang lain, namun ada sebuah perbedaan yang mencolok antara Salafiyah Harakiyah ini dengan gerakan Salafi yang lain, Salafiyah Harakiyah menvonis kafir pemerintahan yang tidak berpegang kepada Syari'at Islam, sedangkan gerakan yang lain tidak seperti itu. Diantara tokoh Salafiyah harakiyah adalah: Dr. Muhammad Abdul Maqshud dan Syaikh Nasyat Ahmad. Diwaktu terjadinya revolusi Mesir 25 Januari, gerakan Salafi ini ikut terjun ke Tahrir Square, bahkan mereka menfatwakan wajib terjun ke Tahrir Square.

Setelah revolusi berhasil, beberapa orang murid Dr. Muhammad Abdul Maqshud mewacanakan untuk mendirikan sebuah partai yang bernama "Hizbul Fadhilah", namun terjadi ketidak sepahaman antara tokoh gerakan, sehingga penggerak Hizbul Fadhilah menyatakan pisah dengan Dr. Abdul Maqshud, kemudian Dr. Abdul Maqshud mendorong murid beliau yang lain untuk bergabung bersama Adil Abdul Maqshud 'Afify (Saudara Dr. Abdul Maqshud) dan mendirikan partai lain yang mereka beri nama "Hizbul Ashâlah". Dengan adanya perselisihan antara partai ini, mengakibatkan sedikitnya dukungan dari rakyat Mesir dalam pemilu parlemen dan majlis Syuro kemaren.

4. Jabhah as-Salafiyah

Gerakan ini muncul setelah terjadinya revolusi 25 Januari, Jabhah as-Salafiyah berusaha untuk menyatukan gerakan-gerakan Salafi yang ada, namun mereka lebih cenderung memiliki kesamaan prinsip dengan Salafiyah Harakiyah. Dr. Khalid Sa'id dipercaya menjadi juru bicara gerakan ini.⁸⁸

Munculnya gerakan-gerakan tersebut telah mempertegas bahwa memang terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam diri Salafi paska pemilu, khususnya pada bidang politik.

5. Revolusi Sebagai Momentum Bertemunya Metode dan Tahapan Kelompok Ikhwanul Muslimin dan Salafi

Pada pembahasan ini penulis ingin menunjukkan beberapa kesamaan antara Ikhwanul Muslimin dan Salafi. Dimana Ikhwanul Muslimin menyadari bahwa terdapat beberapa kesamaan antara metode dan sasaran dakwah Salafi dengan tahapan tujuan pertama hingga tujuan keempat (politik) milik Ikhwanul Muslimin yang kemudian muncul khususnya setelah terjadinya revolusi. Sehingga menyebabkan Ikhwanul Muslimin bersedia bekerjasama dengan Salafi dalam mewujudkan negara Islam di Mesir.

Kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya dua golongan atau kelompok tidak akan dapat bersatu jika tidak terdapat kesamaan di dalamnya baik dalam tujuan ataupun jalan untuk menuju tujuan tersebut. Kesamaan itu bisa timbul dengan

⁸⁸ <http://www.in-former.org/2012/06/mahasiswa-aktor-utama-revolusi-negeri.html>

sendirinya atau dengan kata lain, mereka memang sudah sama sejak awal dilakukannya kerjasama. Dalam kasus yang lain, kerjasama juga dapat dilakukan oleh dua kelompok yang tidak memiliki kesamaan. Namun hal itu tidak akan dapat terwujud kecuali dengan dua syarat. Pertama, salah satu dari kelompok tersebut bersedia untuk berubah sehingga bisa mengikuti kelompok yang satu lagi. Kedua, kedua-duanya sama mengubah pendirian mereka sehingga menemukan satu jalan yang sama sehingga mereka bisa melakukan kerjasama.

Analisa yang akan penulis gunakan saat ini adalah syarat yang pertama yaitu, salah satu kelompok merubah pendiriannya sehingga dapat mengikuti kelompok yang satu lagi. Dengan begitu analisa ini akan menjelaskan bagaimana salah satu kelompok yang dalam konteks ini adalah Salafi telah merubah pendiriannya atau orientasinya tentang pemilu sehingga dapat setara dengan Ikhwanul Muslimin yang dari masa-masa awal didirikannya sudah sangat aktif berpartisipasi dalam pemilu.

1. Tiga Fase Perubahan

Perubahan tersebut dapat digambarkan dengan cara membaginya ke dalam tiga fase perubahan yaitu sebelum berubah atau pra revolusi, ketika berubah atau paska terjadinya revolusi dan setelah berubah.

Fase sebelum berubah yaitu pada masa rezim Mubarak atau pra revolusi yang digambarkan dengan adanya beberapa ketidaksamaan atau pertentangan Salafi dengan Ikhwanul Muslimin. Adapun beberapa pertentangannya adalah sebagai berikut:

Letak perbedaan yang pertama adalah dalam hubungan dan interaksi kedua kelompok tersebut dengan pemerintah Hosni Mubarak, dimana Ikhwanul Muslimin bersifat sangat keras terhadap pemerintah sebaliknya pemerintah juga keras terhadap mereka, sedangkan Salafi bersifat lebih permisif dan lunak terhadap pemerintah begitu pula pemerintah terhadap mereka yang tidak sekeras bagaimana pemerintah dengan Ikhwanul Muslimin. Perbedaan yang kedua adalah bahwa mereka memiliki jalan yang berbeda dalam menciptakan masyarakat yang Islami untuk mewujudkan Negara Islam. Kelompok Ikhwanul Muslimin sangat memperjuangkan jalur pemilu sebagai jembatan untuk melengkapi tahapan yang keempat (politik) dalam perjalanannya mewujudkan Negara Islam, sedangkan Salafi lebih memilih untuk tidak berkecimpung ke dalam pemilu dan hanya mengandalkan dakwah dalam pendidikan dan doktrin keagamaan.

Fase ketika berubah yaitu tepat setelah terjadinya revolusi, dimana Mesir berada pada masa transisi, belum ada penguasa atau pemerintahan yang baku, sehingga kekosongan tersebut mendorong beberapa kelompok untuk berpartisipasi dalam memperbutkan kursi pemerintahan bahkan kursi presiden. Saat itu kelompok Salafi berperilaku tidak seperti biasanya, dimana biasanya mereka tidak pernah bersentuhan dengan pemilu dan bahkan menentangnya, kini mereka muncul dengan beberapa pernyataan dari beberapa tokoh mereka yang menunjukkan bahwa mereka setuju dengan pemilu seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Fase setelah berubah adalah dimana orientasi mereka yang berubah tentang pemilu mendorong mereka untuk turut berpartisipasi dengan mendirikan beberapa gerakan sebagai cikal bakal terbentuknya partai politik seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Ketiga fase perubahan tersebut sejatinya telah berdampak pada perubahan jalan mereka yaitu jalan yaitu jalan mereka untuk mewujudkan pemerintahan yang Islami untuk menuju Negara Islam. Maka dari sinilah kita bisa melihat bahwa terjadi pembelokan jalan dari yang semula tidak senada dengan kelompok Ikhwanul Muslimin, kini menjadi senada dan searah. Sehingga jalan yang searah tersebut melahirkan beberapa kesamaan-kesamaan yang kemudian mengarahkan mereka untuk saling bekerjasama dan meneruskan jalan mereka menuju Negara Islam.

2. Persamaan Kelompok Salafi Dengan Kelompok Ikhwanul Muslimin

Pada bagian awal pembahasan ini selalu ditunjukkan bahwa terdapat banyak sekali pertentangan antara Salafi dengan Ikhwanul Muslimin. Dan yang paling menonjol adalah bagaimana pandangan mereka tentang politik sehingga mempengaruhi ekspresi gerakan mereka dalam pemilu maupun interaksi mereka dengan pemerintahan. Sehingga menjadi hal yang sangat menarik ketika kelompok Salafi secara tiba-tiba merubah pandangan mereka yang dahulu sangat anti dengan pemilu kini menjadi aktif dan yang dulu tidak terlalu bersuara pada pemerintah kini cenderung vocal serta kritis terhadap pemerintah.

Dalam hal ini revolusi telah menaruh andil yang sangat besar karena telah berhasil memunculkan kesamaan-kesamaan yang tersembunyi dari kedua kelompok tersebut sehingga semakin meluruskan kedua kelompok tersebut untuk menjalin kerjasama.

Adapun beberapa persamaan yang bisa penulis tangkap adalah sebagai berikut:

Pertama, yaitu dalam metode dakwah Salafi. Salafi selalu terfokus pada kegiatan dakwah, dan mendidik umat untuk mengenal Islam dan mendalaminya, terutama mendidik generasi muda Muslim, agar mereka mengikuti jejak para generasi pertama Salaf, yang benar-benar hanya mengutamakan al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad shallahu alaihi wassalam.⁸⁹ Metode yang dilakukan adalah perbaikan-perbaikan dengan cara berdakwah mengajak manusia kepada Allah, memurnikan mereka dari polusi kesyirikan, bid'ah, dan maksiat, lalu membimbing dan membina mereka kepada pemahaman dan praktek Islam yang baik dan benar.

Hal tersebut serupa dengan kegiatan dakwah Ikhwanul Muslimin yang terdapat pada tahapan tujuan pertama (individu), kedua (rumah tangga), dan ketiga (masyarakat lokal) dalam pendidikan kadernya. Di sini Ikhwanul Muslimin berupaya untuk menempatkan kehidupan setiap individu dalam naungan sistem Islam sehingga seluruh aspek kehidupan hanya berada di bawah petunjuk Islam. Dengan demikian individu-individu tersebut akan

⁸⁹<http://www.globalMuslim.web.id/2012/04/Salafi-kami-menolak-negara-agama.html>

membentuk suatu keluarga ataupun rumah tangga yang Islami dan dengan praktek kehidupan yang selaras dengan sistem Islam, niscaya rumah tersebut akan menjadi basis dakwah dan pembangunan masyarakat Muslim yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Keluarga-keluarga yang terbentuk dari individu-individu yang juga berpegang teguh pada nilai Islam pada akhirnya akan mengantarkan pada masyarakat lokal yang Islami dan menjadi basis untuk didirikannya pemerintahan Islam yang ideal.

Dari sini kita bisa melihat bahwa antara kedua kelompok tersebut sama-sama menempatkan posisi individu pada urutan terpenting sebagai sasaran utama dakwah sebagai pondasi awal terbentuknya sebuah negara Islam yang ideal.

Kedua, yaitu dalam konsep negara Islam. "Kaum Salaf berpendirian, bahwa sebuah negara dinamakan negara Islam selagi masih ada panggilan untuk sholat (azan) dan didirikan sholat dengan terang-terangan serta penduduknya (rakyatnya) sentiasa mendirikan sholat dengan bebas (aman)".⁹⁰

Namun di sisi lain mereka juga berusaha menggambarkan pemerintahan yang ideal melalui pernyataan-pernyataan mereka di bawah ini, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Salafi juga memiliki harapan untuk mewujudkannya, yaitu pemerintahan yang berlandaskan sistem Islam. Dalam hal ini Salafi selalu menempatkan seorang pemimpin dan

⁹⁰http://shuhmy.multiply.com/reviews/item/21?&show_interstitial=1&u=/reviews/item.

Lihat: Iktiqad Aimmatu Ahlu Hadis, hlm. 50

ulama' sebagai sosok yang sangat penting dalam suatu pemerintahan yang Islami.

Para pemimpin adalah penguasa yang mampu menggunakan kuasa mereka melaksanakan pemerintahan berasaskan prinsip *Siyasah As-Syariyah*. Para ulama pula adalah terminal ilmu yang mampu dan diberi mandat membentuk akidah dan pemikiran umat ke arah pemahaman *Siyasah Islamiyah* (*Siyasah As-Syariyah* yang lebih berdisiplin lagi profesional). Ulama telah diwajibkan oleh syara bekerjasama dengan pemimpin. Dipikulkan ke atas mereka tanggungjawab sosial mentarbiyah umat agar mentaati pemimpin demi menghindari perpecahan serta menghapuskan fitnah di kalangan masyarakat. Maka sebuah negara itu dinamakan negara Islam apabila ulama dan umara (pemimpin) bekerjasama membangun rohani dan jasmani, secara fisik dan mental untuk kebaikan dunia dan akhirat.

Tokoh Salafi juga menjelaskan Bahwa agama dan penguasa adalah seumpama dua sisi mata yang tidak boleh terpisah. Apabila diangkat salah satunya, maka akan terangkatlah yang lainnya, kerana agama itu bagaikan asas bangunan, sedangkan penguasa seperti penjaga asas tersebut. Sesuatu yang tidak ada asasnya akan hancur dan sesuatu yang tidak ada penjaganya akan lenyap dengan cepat.⁹¹

Salafi juga menjelaskan bahwa Termasuk tanda-tanda negara Islam ialah apabila ulama diberi ruang berada di samping pemimpin Islam, kerana

⁹¹ Lihat: Ruhul Ma'ani 1/174. Cetakan Al-Muniriyyah. Lihat: Al-Bahrul Mihit. 2/269. Abi Hayyan

agama dan pemimpin (politik) tidak dapat dipisahkan. Berkata Abu Abdillah al-Qala'i as-Syafir rahimahullah:

“Keseimbangan urusan agama dan dunia adalah satu tujuan yang sangat diidam-idamkan. Hal ini tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya penguasa (pemimpin). Kalau kami tidak memandang wajib adanya penguasa, pasti hal ini akan menyebabkan manusia berada di dalam perselisihan dan kerusuhan yang berpanjangan sehingga Hari Kiamat. Kalau manusia tidak mempunyai pemimpin yang kuat dan ditaati, pasti akan pudar kemuliaan Islam lalu lenyap tak berbekas. Jika umat tidak mempunyai penguasa yang berdaulat, pasti akan lenyap aktivitas-aktivitas ibadah dan terhentilah perdagangan import-eksport”.⁹²

Termasuk tanda negara Islam yang lain ialah apabila pemimpin dan ulama sentiasa bekerjasama dan senantiasa saling menghormati, kerana inilah asas kesejahteraan agama, keutuhan politik (siyasah), keselamatan, perpaduan dan keharmonian rakyat, inilah juga penyebab pemimpin dan ulama dihormati.⁹³

Hal tersebut mirip dengan yang dialami oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir. Di mana para ulama' dan pemimpin umat telah merapatkan barisan untuk mendukung pemerintahan Islam. Dalam pernyataan bersama yang ditandatangani oleh 19 ulama' dan pemimpin umat dari partai-partai Islam pada tanggal 21 oktober 2011 menegaskan untuk menjunjung tinggi perdamaian dan kepentingan nasional, mengedepankan kerja untuk menolong agama

⁹² Lihat: Tahzib ar-Riyasah. Hlm 95. Lihat: Majmu al-Fatawa 27/390. Ibn Taimiyah

⁹³ http://shuhmy.multiply.com/reviews/item/217&show_interstitial=1&u=/reviews/item

Allah, menjauhi segala bentuk perbedaan pendapat meskipun hal itu yang remeh-remeh yang terjadi di barisan kelompok Islam.

Pernyataan itu juga menambahkan bahwa:

“Kita adalah pemilik aqidah dan prinsip-prinsip *rabbaniyah samawiyah*, kami menginginkan kebaikan dan kemajuan bagi kemanusiaan semuanya tanpa terkecuali. Kami bukanlah pencari kekuasaan dan kedudukan. Sehingga tidak dinilai bahwa para Islamis telah gagal sebelum bertanding. Agar semua mata dunia melihat pada kami, bahwa kami mempunyai misi yang luhur, kami menyeru untuk menyatukan barisan dan satu tujuan. Persatuan dan kesatuan ini adalah merupakan garis merah yang tidak boleh dilewatkan.”⁹⁴

Dari pernyataan tersebut jelas ditunjukkan bahwa Ikhwanul Muslimin dengan para ulama' telah memiliki hubungan yang sangat erat bahkan saling bahu-membahu dalam membentuk serta memperjuangkan sistem Islam di Mesir. Sehingga dalam konteks yang kedua ini cukup untuk menunjukkan bahwa persamaan dalam bidang pemerintahan telah menyebabkan Ikhwanul Muslimin bersedia untuk bekerjasama dengan kelompok Salafi.

⁹⁴ Abu Gozzah, *Musim Semi Revolusi Dunia Arab*. Maktaba Gaza, Jakarta. 2012 hal 25